

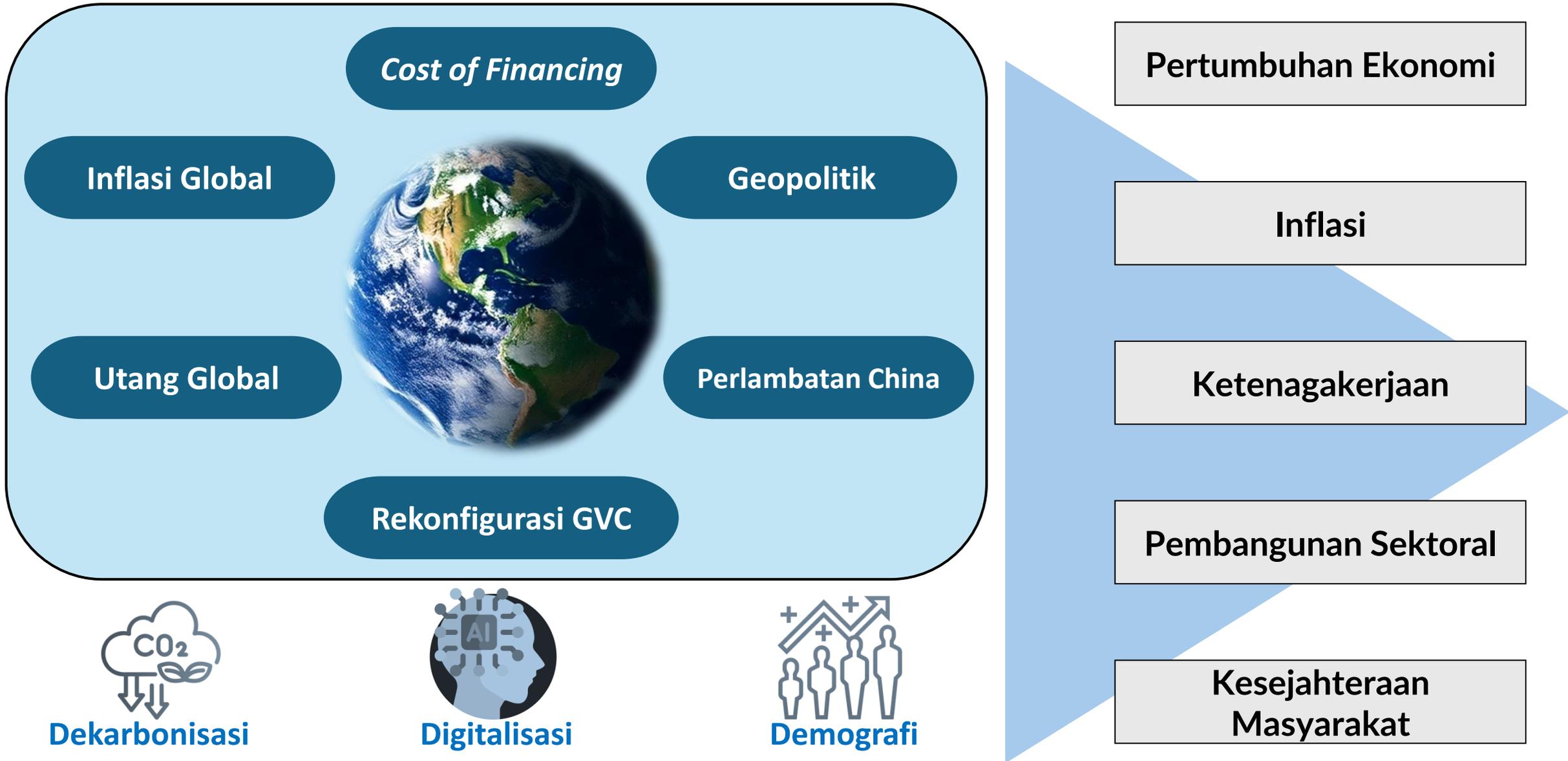


MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL, MONETER, DAN KEUANGAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2024
3 Desember 2024

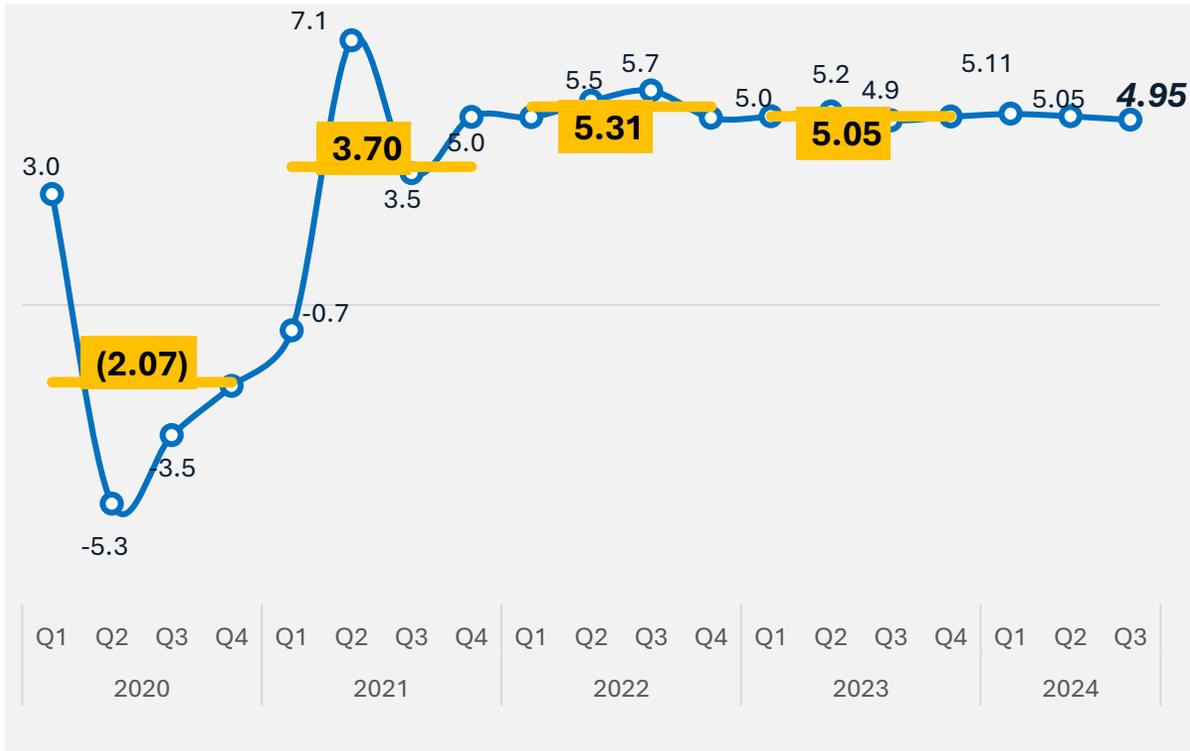
KETIDAKPASTIAN GLOBAL MENIMBULKAN TANTANGAN SIGNIFIKAN BAGI STABILITAS MAKROEKONOMI



EKONOMI INDONESIA TUMBUH 4,9% (YOY) PADA TW III 2024, SEMENTARA PENGENDALIAN INFLASI MENUNJUKKAN HASIL YANG BAIK

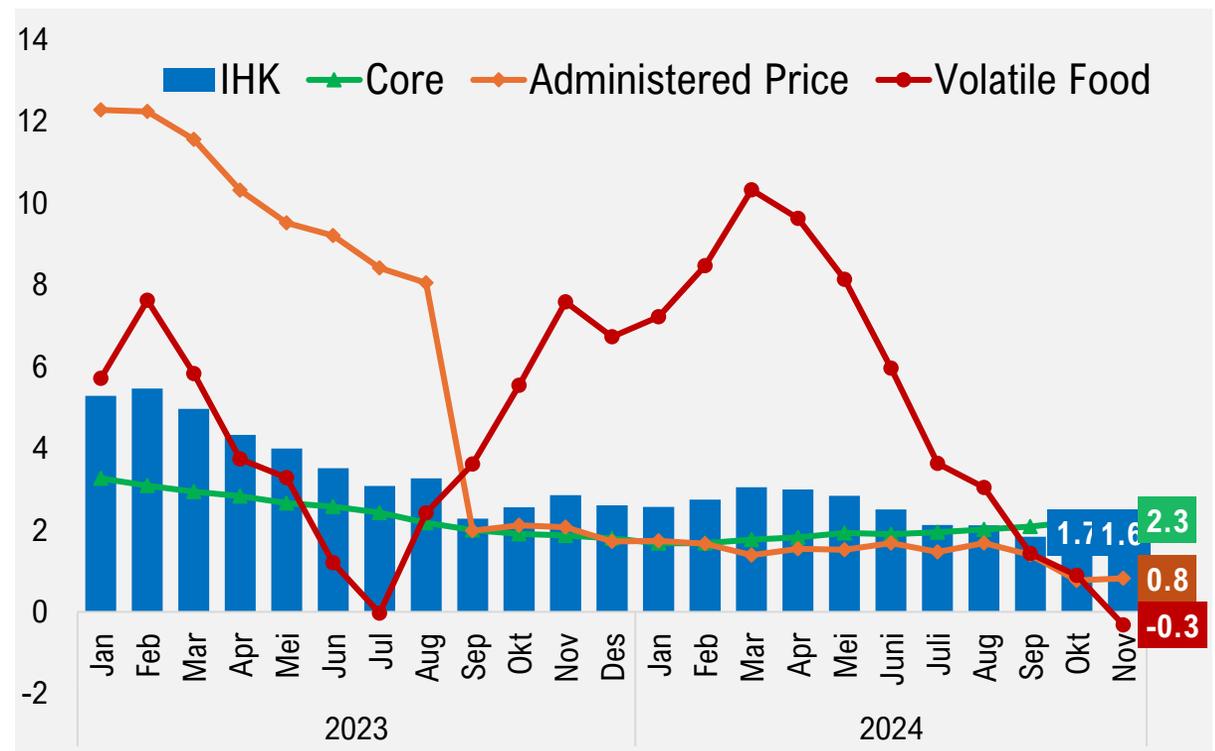
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)

Sumber: BPS



Perkembangan Inflasi (% ,yoy)

Sumber: BPS



- **Konsumsi rumah tangga** menjadi penopang kuatnya pertumbuhan ekonomi, didukung oleh **tingkat inflasi yang terkendali**, terutama komoditas pangan.
- **Investasi** mencatat pertumbuhan terus meningkat di tiap kuartal 2024 (Pemerintah & swasta)
- **Konsumsi Pemerintah** melalui belanja fiskal untuk barang dan pegawai turut mendukung aktivitas ekonomi.
- **Ekspor** yang didukung **hilirisasi** memberikan dukungan tinggi bagi perekonomian
- **Sektor manufaktur** menjadi penopang utama, terutama yang berbasis **hilirisasi**.

AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG UPAYA MITIGASI RISIKO TERHADAP GEJOLAK PEREKONOMIAN GLOBAL



DINAMIKA PEREKONOMIAN

(a.l. Geopolitik, Fragmentasi, Perlambatan Tiongkok)



VOLATILITAS HARGA KOMODITAS
(a.l. CPO, Batu bara, Minyak)



TANTANGAN PEMBANGUNAN
(a.l. *stunting*, kemiskinan Ekstrem, gap infrastruktur)

DAMPAK YANG DITIMBULKAN

MENGGANGGU STABILITAS EKONOMI

(Inflasi, Suku bunga & Nilai Tukar)

RISIKO KEBERLANJUTAN FISKAL

UPAYA MITIGASI

APBN SEBAGAI *SHOCK ABSORBER*

- **Stabilisasi harga** dan pengendalian inflasi
- Melindungi **daya beli** masyarakat

MENJAGA DISIPLIN APBN:

- APBN dijaga tetap sehat dan kredibel
- Defisit terkendali dibawah 3% PDB,
- Pembiayaan yang efisien dan pasar SBN yang stabil.

BAURAN KEBIJAKAN FISKAL, MONETER, SEKTOR KEUANGAN

MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN TETAP MENJAGA STABILITAS, MELINDUNGI DAYA BELI, DAN KEBERLANJUTAN FISKAL

Untuk Tumbuh Tinggi: Perlu Peningkatan Investasi dan Produktivitas



SISI MODAL (INVESTASI)

- ❑ Investasi (modal) menjadi sumber utama pertumbuhan
- ❑ Sumber Investasi domestik terbatas, sehingga perlu FDI yang tinggi
 - a) Peningkatan FDI melalui perluasan hilirisasi (aktivitas smelter, agro-industri, perikanan, rumput laut, dll)
 - b) FDI di sektor energi terbarukan dan industri hijau (panel surya, EV, baterai, dll)
 - c) FDI sektor high-tech (semi-konduktor, AI, data center, dll)
- ❑ Perbaikan iklim investasi dan bisnis mutlak harus terus dilakukan

SISI TENAGA KERJA

- ❑ Perbaikan kualitas SDM
- ❑ Mengembangkan future talent sesuai arah transformasi ekonomi
- ❑ Penguatan *link & match* Sekolah Vokasi dan Perguruan Tinggi dengan Korporasi

SISI PRODUKTIVITAS

- ❑ Perbaikan infrastruktur, sistem regulasi, dan efisiensi birokrasi
- ❑ Penguatan **infrastruktur digital**
- ❑ Peningkatan R & D untuk mendorong inovasi
- ❑ Penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK NAMUN TETAP MENJAGA IKLIM INVESTASI

Perluasan basis pajak, pembenahan administrasi, dan insentif untuk mendukung transformasi ekonomi

KEBIJAKAN PAJAK 2025

PENGUATAN BASIS PERPAJAKAN MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

1. Perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak;
2. Penguatan aktivitas pengawasan pajak dan *law enforcement*;
3. Prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi *digital*;
4. Peningkatan kerja sama perpajakan internasional;
5. Pemanfaatan *digital forensic*.

PENGUATAN ORGANISASI DAN SDM

1. Peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
2. Optimalisasi kegiatan *joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence*;
3. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi.

INSENTIF FISKAL YANG TERARAH DAN TERUKUR

1. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM;
2. Insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

INTEGRASI TEKNOLOGI UNTUK PENGUATAN SISTEM PERPAJAKAN

- Melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)* dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan DSP4 berbasis risiko;

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN SESUAI UU HPP

- Penerbitan regulasi turunan UU HPP berupa PP dan PMK.

PEMERINTAH TETAP Mendukung Kelas Menengah

STIMULUS MASYARAKAT KELAS MENENGAH

➤ Stimulus Sektor Perumahan

- PPN dibebaskan untuk rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya
- Pemberian insentif PPN DTP tahun 2023 dan 2024 untuk rumah
- Penambahan kuota perumahan bagi MBR dari 166 ribu menjadi 200 ribu

➤ Stimulus Sektor Otomotif

- PPnBM 0% untuk kendaraan Listrik tertentu
- PPN DTP sebesar 10% untuk Kendaraan Listrik
- PPnBM DTP kendaraan Listrik tertentu tahun 2024.
- PPnBM dengan tarif lebih rendah untuk LCGC dan kendaraan hybrid
- Bea Masuk 0 persen atas impor kendaraan listrik tertentu tahun 2024

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)

- Pemberian **kompensasi finansial** dan **dukungan pelatihan** bagi Pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- Langkah ini bertujuan untuk mencegah kemiskinan dan kerentanan ekonomi, serta memastikan stabilitas ekonomi melalui pemeliharaan tingkat konsumsi rumah tangga.

PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN

- Peningkatan akses permodalan melalui berbagai program pembiayaan, diantaranya **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** akan terus ditingkatkan.
- Realisasi KUR Jan 2024 s.d. 30 Juli 2024 sebesar Rp166,20 triliun (59,36% dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun) dan diberikan kepada 2,82 juta debitur.
- **KUR** berkontribusi sebesar **33,4%** terhadap pembiayaan **UMKM**.



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA



THANK YOU



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

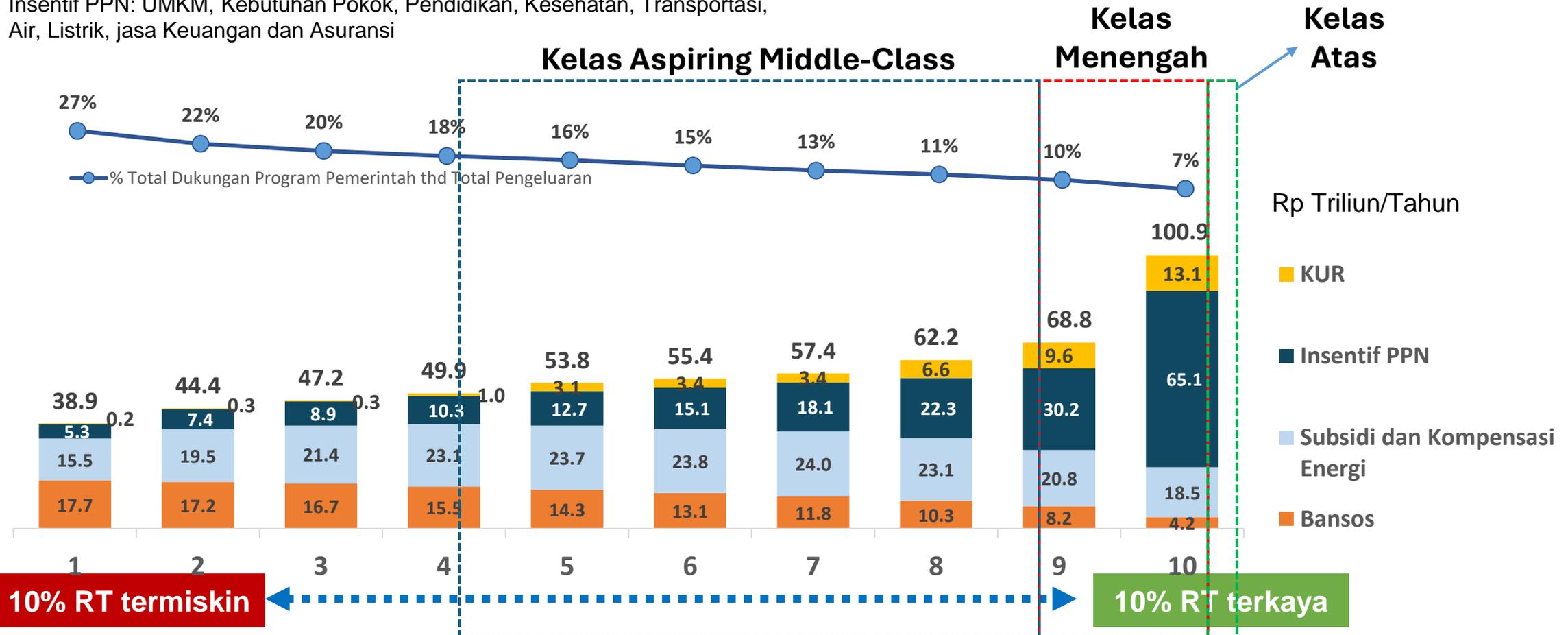
LAMPIRAN



BERBAGAI PROGRAM PEMERINTAH (SUBSIDI, INSENTIF PPN, PERLINSOS, KUR) KUAT MENOPANG RT MISKIN, RENTAN, DAN KELAS MENENGAH

- Bansos: PKH, Sembako, PIP, PBI JKN
- KUR: Subsidi Bunga KUR
- Subsidi & Kompensasi: BBM, Listrik, LPG
- Insentif PPN: UMKM, Kebutuhan Pokok, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Air, Listrik, jasa Keuangan dan Asuransi

Insentif Pajak Konsumsi Lebih Banyak Dinikmati Kelas Menengah



Sumber: Estimasi menggunakan Realisasi APBN 2023 dan Susenas Maret 2023, diolah

KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2025 DIARAHKAN UNTUK Mendukung PEREKONOMIAN DOMESTIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1

KEBIJAKAN UNTUK Mendukung PEREKONOMIAN DOMESTIK

- a. Pemberian fasilitas kepabeanan **pembangunan IKN dan daerah mitra** serta **mendukung hilirisasi industri nasional**;
- b. Pemberian insentif kepabeanan untuk **menarik investasi dan meningkatkan ekspor**;
- c. **Penyediaan insentif fiskal** untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM;
- d. **peningkatan efektivitas kerja sama** kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.



2

KEBIJAKAN UNTUK Mendukung PENGAWASAN

- a. **Penguatan peran pengawasan *post clearance***, pencegahan dan pemberantasan **penyelundupan** serta peredaran Barang Kena Cukai ilegal;
- b. **Peningkatan kapasitas** pengawasan dan efektivitas **penegakan hukum** serta penguatan kapasitas pengawasan laut;
- c. **Pencegahan dan pemberantasan** penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP).

3

KEBIJAKAN UNTUK Mendukung PENERIMAAN

- a. **Peningkatan kepatuhan pengguna jasa** kepabeanan dan cukai;
- b. **Mendukung kualitas kesehatan masyarakat** melalui cukai MBDK dan reviu kebijakan jual eceran produk hasil tembakau;
- c. **Intensifikasi bea keluar** produk sawit dan mineral;
- d. **Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif** dalam mendukung industri dan perdagangan;
- e. **Penguatan kolaborasi dan sinergi** dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan *core revenue system*.

4

KEBIJAKAN UNTUK Mendukung MANAJEMEN ORGANISASI DAN SDM

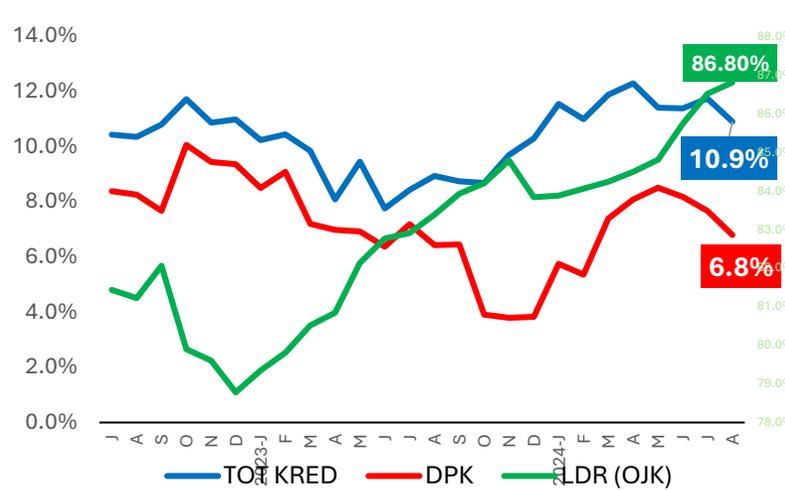
- a. **Penyempurnaan proses bisnis** kepabeanan dan cukai;
- b. Pengembangan **infrastruktur IT yang modern dan andal**;
- c. Penataan **organisasi pusat dan vertikal yang agile dan dinamis**;
- d. Penataan manajemen **SDM sesuai kebutuhan organisasi**;
- e. Pengelolaan **keterbukaan informasi**, publikasi, dan strategi komunikasi yang efektif.

KEBIJAKAN MONETER DIARAHKAN UNTUK MENJAGA STABILITAS NILAI TUKAR DAN INFLASI, DENGAN TETAP MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

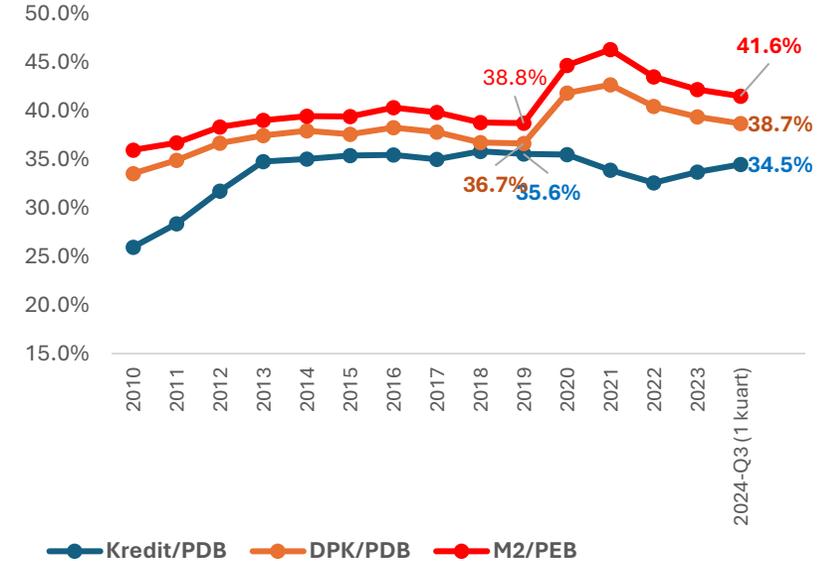
BI Rate, Inflasi dan Nilai Tukar



Kredit, DPK, dan LDR



Kredit, DPK, M2 (terhadap PDB)



- Kebijakan suku bunga BI masih diarahkan pada upaya menjaga tingkat inflasi serta mengurangi tekanan pada nilai tukar.
- Inflasi dalam tren perlambatan sejak April 2024, tetapi Rupiah kembali terdepresiasi cukup dalam → BI-rate bertahan di level 6,0 persen.

- Pertumbuhan Kredit masih cukup tinggi (double digit) untuk mendukung aktivitas ekonomi
- Pertumbuhan DPK lebih rendah dari Kredit, namun masih terdapat Tabungan yang cukup dari masa pandemi.
- LDR meningkat mengindikasikan intermediasi yang semakin membaik